

PERANAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN *CIVIC CONSCIENCE*

Yunisca Nuralisa¹, Ana Mentari², Rohman³

Prodi PPKn FKIP Universitas Lampung,

Email: yunisca.nuralisa@fkip.unila.ac.id

Abstract: *The phenomenon at this time, we often find children no longer respect parents, anti-social attitudes that appear from everyday life both at school and society. In global competition, a nation needs to be an innovative nation to become a superior nation. Then the need for a strong order of values and policies so that the crisis of culture and national disintegration does not occur in Indonesia. Education in Indonesia must instill national character and spirit originating from the nation's cultural roots and based on Pancasila as the basis of country, philosophy, and noble values. Through, citizenship education learning is expected to be a solution in fostering citizens who have social awareness.*

Keywords: *Citizenship Education Learning, Civic Conscience*

Abstrak: Fenomena saat ini, sering kita jumpai anak tidak lagi hormat pada orang tua, sikap-sikap anti sosial yang nampak dari kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun masyarakat. Dalam persaingan global, suatu bangsa perlu menjadi bangsa yang inovatif agar menjadi bangsa yang unggul. Maka perlu adanya tatanan nilai dan kebijakan yang kuat agar krisis kebudayaan dan disintegrasi bangsa tidak terjadi di Indonesia. Pendidikan di Indonesia haruslah menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan yang berasal dari akar budaya bangsa dan jelas berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi dan nilai luhur bangsa. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembinaan warga negara yang memiliki kesadaran sosial.

Kata kunci: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, *Civic Conscience*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang berbeda dengan negara lainnya. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia telah beberapa kali berada dalam masa penjajahan, masa perjuangan melawan penjajah, perjuangan menegakkan kemerdekaan, perjuangan mengisi kemerdekaan (Orde lama, Orde baru, Reformasi). Pada masing-masing masa tersebut rakyat Indonesia memiliki perjuangan yang berbeda-beda karena tingkat permasalahan yang dihadapi tidak selalu sama setiap masanya. Pada masa kolonialisme ditandai dengan perampasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk kepentingan penjajah. Pada masa perjuangan melawan penjajah tumbuh jiwa patriotisme, rela berkorban yang luar biasa untuk menghadapi penjajah. Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Setiap masa akan melahirkan calon penerus bangsa yang akan memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Calon-calon penerus tersebut tidak akan muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang sesuai dengan problem dan tantangannya. Pada masa sekarang dengan sendirinya akan berbeda problem dan tantangannya jika dibanding dengan pada masa sebelumnya, sehingga proses dan metode yang digunakan pun harus berbeda.

Era Revolusi Industri 4.0, kita Bersama yang kita kenal dengan *disruption era*. Selain itu, era revolusi industry 4.0 identik dengan *big data*, *internet of things*, *3D printing*, teknologi AI, serta *disruptive science and technology innovation*, yang ditandai dengan banyak aplikasi yang memberikan kita kemudahan diantaranya, grab, gojek, bukalapak, Airbnb, traveloka, Lazada, pegipegi.com, smart city dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang membuat ruang gerak manusia semakin sedikit dan membuat kita sering sekali mager (malas gerak) dikarenakan kita dibuaikan dengan segala kemudahan yang serba instan. Ruang komunikasi akan semakin terbatas karena kita jarang bertemu dengan teman dan orang lain. Setiap individu akan menjadi lebih individual dan kepekaan social akan semakin berkurang, karena banyaknya berita hoak yang berkembang di era distrust data. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk perlunya penguatan dan peranan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun *civic conscience*, agar setiap individu yang ada di Indonesia merupakan seorang individu yang tidak hanya cerdas namun mempunyai karakter dan *social awareness* yang baik.

Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negaranya. Mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan kampus merupakan *agent of change* yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Oleh karena itu, harus adanya usaha yang harus dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak berada dalam masa penjajahan seperti dulu yaitu dengan memberikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun *Citizenship Conscience* kepada mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fibriana (2018:5-6) Pelaksanaan pembelajaran pada Hakikatnya merupakan implementasi dari perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS yang merupakan perencanaan pembelajaran selama satu semester kemudian dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan Kontrak pembelajaran untuk dilaksanakan dalam setiap kali pertemuan. Pembelajaran sebagai bentuk dari praktik pendidikan merupakan proses dinamis yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pendidik, peserta didik (Mahasiswa), dan materi pembelajaran Dalam upaya membina kesadaran bela negara mahasiswa, kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan pada upaya bagaimana memotivasi mahasiswa agar memiliki motivasi dan antusiasme dalam mengkaji berbagai masalah kebangsaan dalam kaitannya dengan materi kebangsaan yang dikaji. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berbagai tindakan atau strategi dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam rangka membangun motivasi belajar mahasiswa.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kewarganegaraan. Winataputra & Budimansyah (2012; Kariadi, 2017: 31), “Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”. Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. PKn bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. Selanjutnya menurut Budimansyah & Suryadi (Kariadi, 2017: 31) “PKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam kurikulum PKn materi-materi yang terdapat didalamnya diharapkan akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai informasi mengenai kewarganegaraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa dan lebih jauhnya akan

dapat mendorong mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan kewarganegaraan dalam lingkup kecil seperti di kampus maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut Kosasih djahiri (1997; Kariadi, 2017: 31): Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Seharusnya di era sekarang, tujuan pendidikan tidak hanya bersumber pada penguatan kognitif peserta didik, akan tetapi penguatan afektif dan psikomotorik juga harus dimiliki peserta didik sebagai hasil dari proses Pendidikan (Nurizka, 2019: 191). Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Terhusus mengenai fungsi pembelajaran Pkn untuk membangun kesadaran kewarganegaraan terhadap bela negara, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan secara tegas dan jelas tentang bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 30 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”, kemudian dalam Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, di pasal 9 diamanahkan secara jelas tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bela negara. Menurut Widodo (2011:11) “bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, rela berkorban menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945”.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas. Sehingga dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga Indonesia tanpa harus dikomando atau diperintah harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulkipani (2017: 52) mengungkapkan bahwa “Implementasi PKn di perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk pembelajaran, yang meliputi *perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi*. Ketiga tahapan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran bela negara mahasiswa”. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam aktivitas pembelajaran yang sangat penting sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Diperlukan analisis yang mendalam untuk merancang perencanaan pembelajaran. Sehingga diperoleh perencanaan pembelajaran yang mengakomodir ketiga kompetensi yang diharapkan yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Perencanaan Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang menjunjung *Citizenship Conscience* mahasiswa, salah satunya ialah pelaksanaan kegiatan bela negara yang mampu memperkuat kesadaran mahasiswa akan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pendidikan kewarganegaraan dievaluasi secara mendalam yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang demi mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya. Hal ini menyatakan bahwa *Citizenship Conscience* bagi mahasiswa sangatlah penting terlebih sebagai penguat dari luasnya arus globalisasi.

Sosok kewarganegaraan yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Menurut Isep (2013: 15) “fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik”. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara widodo (2011: 19) yaitu a) ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik; b) menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c) ikut serta dalam pemilihan umum; e) berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan negara. Sehingga mahasiswa akan sadar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara memiliki rasa tanggungjawab untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung
2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung
3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung

Urgensi penelitian ini dilihat dari beberapa tahapan meliputi,

1. Peningkatan implementasi *Citizenship Conscience* pada mahasiswa, khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Dalam *penerapan Citizenship Conscience* dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki oleh program studi PPKn dan kemampuan untuk menggali sumberdaya yang ada di dalam dan luar instansi. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan sumberdaya yang terbatas mampu melaksanakan citizenship Conscience secara baik, karena kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan bela negara secara utuh dan konsisten. Menurut Bintaro Tjokroamidjojo 1997 dalam Agustrian (2017: 8) Baharudin (2014:54) mengemukakan bahwa, “Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Friedman dalam Agustrian (2017: 8) “Perencanaan adalah proses yang menggabungkan pengetahuan dan teknik ilmiah di dalam kegiatan organisasi”. Berdasarkan pendapat di atas

peneliti menyimpulkan bahwa, Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan keperluan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan.

2. Pendalaman sistem Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung agar terlaksananya kegiatan bela negara yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Goerge R. Terry (1986) dalam Agustrian (2017: 8) menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut”. Dari pendapat di atas peneliti simpulkan bahwa, Pelaksanaan adalah upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan dan permotivasi agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan bela negara agar memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan bagi mahasiswa. Baharudin (2014:251) dalam Agustrian (2017: 9) mengemukakan bahwa, “Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara sistematis terencana, dan terarah berdasarkan turunan yang jelas”. Sedangkan menurut Willbur Harris Agustrian (2017: 9) menjelaskan bahwa, “Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Proses penetapan keputusan ini didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan kriteria tertentu. Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Evaluasi adalah suatu kegiatan menilai yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan informasi guna pengambilan dan sebagai salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam kegiatan apapun termasuk dalam kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi dengan jenis penelitian atau metode survey. Dasar pertimbangan adalah 1) penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung; 2) Menjelaskan dan mendeskripsikan pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung; 3) Penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan saja, melainkan juga mengevaluasi tentang implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Unit analisisnya adalah persepsi Dosen dan Mahasiswa tentang implementasi pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship*

Conscience pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung.

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah : 1)Angket, alat ini digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data persepsi guru dan tenaga kependidikan tentang implementasi prinsip-prinsip MBS di SMK swasta di Kota BandarLampung tempat bertugas, 2) wawancara, alat ini digunakan untuk menggali informasi dari Ketua Program Studi PPKn tentang implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Citizenship Conscience* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung, 3)Dokumentasi, alat ini digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang sifatnya tertulis dan terdokumentasi, seperti profil sekolah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, statistik yang digunakan statistik deskriptif yaitu sebatas mencari persentil dan pembuatan tabel distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melaksanakan penelitian, selanjutnya penulis menganalisis data yang telah diperoleh. Kemudian, penulis akan mencoba menguraikan dan menjelaskan keadaan sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai implementasi pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk *citizenship conscience*:

a. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas. Pendidikan Kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara (Supriyanto, 2018: 116).

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. David Kerr (1999:2), "*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*". Hal ini bermakna bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Quigley, Buchanan, dan Bachmuller (1991:11) "... *those attitudes and habits of mind of the citizen that are conducive to the the healthy functioning and common good of the democratic system*". Maka, mahasiswa akan lebih memahami lagi betapa besar perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun indikator pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian ini memiliki tiga indikator, yaitu:

1) *Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan keperluan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat rencana. Tjokroamidjojo (Agustrian, 2017: 8) mempertegas bahwa, “Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu”. Pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang perencanaan pembelajaran PKn dijelaskan bahwa, terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, bagaimana keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu harus dipahami oleh mahasiswa, karena dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mampu mengimplementasikan pembelajaran PKn dengan baik. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa, sebagian besar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kewarganegaraan mampu memahami perencanaan pembelajaran PKn mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari, namun hal ini tidak semua mahasiswa dapatkan dari tenaga pendidikan atau dosen, terdapat beberapa mahasiswa yang mengetahui hal tersebut melalui membaca buku, atau melalui sumber lain seperti internet. Hal ini perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik atau dosen agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Indikator Perencanaan Pembelajaran PKn

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	14 – 15	8	40%	Setuju
2	12 – 13	7	35%	Kurang Setuju
3	10 – 11	5	25%	Tidak Setuju
Jumlah		20	100%	

Sumber: Hasil Analisis Data Angket tahun 2019

Pada penelitian ini indikator perencanaan pembelajaran PKn terdiri dari tiga kategori yakni setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Selanjutnya diperoleh data sebanyak 5 responden (25%) menyatakan kategori tidak setuju. Beberapa mahasiswa tidak memahami perencanaan pembelajaran PKn, hal ini dikarenakan tenaga pendidik atau dosen kurang menyampaikan informasi serta kurang memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari mahasiswa untuk mencari tau dan kurangnya budaya literasi dari diri mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak memahami dengan baik akan perencanaan pembelajaran yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari hasil analisis data diperoleh sebanyak 7 responden (35%) menyatakan kategori kurang setuju terhadap perencanaan pembelajaran PKn. Beberapa mahasiswa kurang memahami secara utuh dan baik mengenai perencanaan pembelajaran PKn, hal ini dikarenakan tenaga pendidik atau dosen kurang menyampaikan informasi serta kurang memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran

yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. Namun, dalam hal ini, terdapat upaya mahasiswa untuk mencari taumelalui buku dan sumber lainnya seperti internet, mahasiswa sedikit tahu adanya perencanaan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan tetapi dalam hal ini masih sangat dibutuhkan pemahaman yang utuh oleh mahasiswa, sehingga diperlukannya upaya tenaga pendidik atau dosen untuk menyampaikan dengan menyeluruh mengenai perencanaan pembelajaran PKn agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh.

Diperoleh data sebanyak 8 responden (40%) menyatakan setuju dengan perencanaan pembelajaran PKn, dikarenakan sebagian besar mahasiswa telah memahami dengan baik mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tenaga pendidik atau dosen telah menyampaikan informasi serta memberikan penjelasan dengan sangat baik dan lengkap mengenai perencanaan pembelajaran yang ada dalam pembelajaran PKn, sehingga telah diimplementasikan dengan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan tersebut, maka perencanaan pembelajaran PKn telah diimplementasikan dengan baik oleh tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan mahasiswa telah menyatakan bahwa, sudah memahami apa saja tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai, garis besar materi yang akan dipelajari, keterkaitan materi yang dipelajari dengan materi lainnya, dan juga manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.

2) Pelaksanaan Pembelajaran PKn

Segala sesuatu termasuk pembelajaran PKn, tentu tidak cukup hanya baik secara perencanaan saja, tetapi pembelajaran yang baik ketika perencanaan yang baik dapat dilaksanakan dalam pembelajaran secara baik pula. Goerge R. Terry (1986; Agustrian, 2017: 8) menjelaskan bahwa, "Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut". Tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang baik merupakan tolak ukur dari sistem pembelajaran yang baik. Adapun pelaksanaan pembelajaran PKn yakni menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan dan permotivasi agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembelajaran sebagai bentuk dari praktik pendidikan merupakan proses dinamis yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pendidik, peserta didik (Mahasiswa), dan materi pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dimaksud meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berbagai tindakan atau strategi dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam rangka membangun motivasi belajar mahasiswa, kemudian dalam setiap pembelajaran diperlukannya sebuah contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan agar mahasiswa mudah dalam memahaminya, tenaga pendidik juga harus bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dan inovatif, selanjutnya tenaga pendidik juga sebaiknya menyediakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi bagi mahasiswa serta tenaga pendidik dapat juga memanfaatkan hasil penelitian untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam hal ini untuk dapat memastikan pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, tidak boleh melenceng dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Indikator Pelaksanaan Pembelajaran PKn

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	13 – 15	10	50%	Setuju
2	10 – 12	6	30%	Kurang Setuju
3	7 – 9	4	20%	Tidak Setuju
Jumlah		20	100%	

Sumber: Hasil Analisis Data Angket tahun 2019

Beberapa mahasiswa program studi pendidikan PKn merasa bahwa pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaan pembelajaran PKn diperoleh data sebanyak 4 responden (20%) menyatakan kategori tidak setuju. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen, tidak dapat mendorong rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi pembelajaran, pemberian contoh dalam setiap materi yang relevan dengan materi yang diajarkan tidak diberikan secara konsisten oleh dosen, kemudian model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran cenderung monoton serta media pembelajaran kurang variatif dan kurang menarik bagi mahasiswa.

Dari hasil analisis data diperoleh sebanyak 6 responden (30%) menyatakan kategori kurang setuju. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen, kurang dapat mendorong rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi pembelajaran, pemberian contoh dalam setiap materi yang relevan dengan materi yang diajarkan kurang diberikan secara konsisten oleh dosen, kemudian model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran kurang inovatif serta media pembelajaran kurang variatif dan kurang menarik bagi mahasiswa.

Dari hasil analisis data diperoleh sebanyak 10 responden (50%) menyatakan kategori setuju. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen, mampu mendorong rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi pembelajaran, pemberian contoh dalam setiap materi yang relevan dengan materi yang diajarkan telah diberikan secara konsisten oleh dosen, kemudian model pembelajaran telah diterapkan secara inovatif serta media pembelajaran variatif, sehingga tampak menarik dan disukai bagi mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran PKn telah diimplementasikan dengan baik oleh tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan mahasiswa telah menyatakan bahwa, pembelajaran telah dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mendorong rasa ingin tahu mahasiswa, mahasiswa mampu memahami mengenai contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan, dosen telah menerapkan model secara inovatif dan media pembelajaran yang telah mampu menarik perhatian mahasiswa dan cukup bervariasi, sehingga mahasiswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.

3) *Evaluasi Pembelajaran PKn*

Evaluasi merupakan suatu kegiatan menilai yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan informasi guna pengambilan dan sebagai salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan apapun termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Baharudin (2014:251; Agustrian, 2017: 9) mengemukakan bahwa, “Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara sistematis terencana, dan terarah berdasarkan turunan yang jelas”. Dalam hal ini, evaluasi pembelajaran PKn dapat diukur dengan sejauh mana pembelajaran tersebut memberikan efek atau dampak terhadap perubahan

yang nyata bagi mahasiswa, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Indikator Evaluasi Pembelajaran PKn

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	13 – 15	9	45%	Setuju
2	10 – 12	6	30%	Kurang Setuju
3	7 – 9	5	25%	Tidak Setuju
Jumlah		20	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket tahun 2019

Pada penelitian ini indikator evaluasi pembelajaran PKn, diperoleh data sebanyak 5 responden (25%) menyatakan kategori tidak setuju. Hal ini dikarenakan menurut beberapa mahasiswa menyatakan bahwa dosen kurang menggunakan instrumen yang bervariasi untuk menilai hasil belajar mahasiswa, ketika melakukan penilaian dosen tidak melakukan secara adil tetapi masih cenderung subyektif yang dipengaruhi oleh perasaan individu. Kemudian, dosen tidak memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan ujian, hal tersebut menyebabkan kurangnya penguasaan materi oleh mahasiswa karena tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi segala situasi, dan salah satunya ujian/ test dadakan yang menjadikan nilai yang dicapai juga sangat tidak maksimal. Selanjutnya, beberapa tenaga pendidik atau dosen memberikan penilaian berdasarkan pada capaian nilai secara akademik saja, dalam aspek sikap dan juga keterampilan tidak dijadikan sebagai penilaian.

Pada kategori kurang setuju diperoleh data sebanyak 6 responden (30%) dalam evaluasi pembelajaran PKn. Hal ini dikarenakan menurut beberapa mahasiswa menyatakan bahwa, dosen kurang menggunakan instrumen yang bervariasi untuk menilai hasil belajar mahasiswa, ketika melakukan penilaian kurang bisa dilakukan secara adil tetapi masih cenderung subyektif yang dipengaruhi oleh perasaan individu. Kemudian, dosen memberikan informasi secara mendadak terkait waktu pelaksanaan ujian, hal tersebut menyebabkan kurangnya penguasaan materi oleh mahasiswa karena kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi segala situasi, dan salah satunya ujian/ test dadakan yang menjadikan nilai yang dicapai juga kurang maksimal. Selanjutnya beberapa tenaga pendidik atau dosen kurang bisa seimbang dalam memberikan penilaian, pada capaian nilai secara akademik menjadi prioritas utama dan pokok, sedangkan pada aspek sikap dan juga keterampilan hanya diberikan nilai tambahan dalam persentase yang sangat kecil.

Pada kategori setuju diperoleh data sebanyak 9 responden (45%) dalam evaluasi pembelajaran PKn. Hal ini dikarenakan menurut beberapa mahasiswa menyatakan bahwa, dosen telah menggunakan instrumen yang bervariasi untuk menilai hasil belajar mahasiswa, ketika melakukan penilaian dilakukan secara adil obyektif. Kemudian, dosen selalu memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan ujian, hal tersebut sangat membantu dalam mempersiapkan diri dalam untuk menghadapi ujian serta mahasiswa mampu mencapai nilai yang maksimal. Selanjutnya beberapa tenaga pendidik atau dosen mampu memberikan penilaian secara seimbang, antara penilaian akademik, sikap dan juga keterampilan pada mahasiswa diberikan persentase yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan tersebut, maka evaluasi pembelajaran PKn telah diimplementasikan dengan baik oleh tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan mahasiswa telah menyatakan bahwa, instrumen penilaian telah dibuat dengan bervariasi untuk menilai hasil belajar mahasiswa, baik penilaian secara akademik, sikap maupun keterampilan. Kemudian, mahasiswa dinilai secara adil dan objektif, terdapat jadwal yang tersusun rapi yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui jadwal secara rinci termasuk didalamnya pelaksanaan ujian.

b. Citizenship Conscience (kesadaran kewarganegaraan)

Sosok kewarganegaraan yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Lickona (1992:51) menegaskan bahwa “*character as a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way. Character conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior*”. Karakter tidak hanya mengandung unsur pengetahuan moral, akan tetapi juga perasaan serta perilaku moral. Oleh karena itu, karakter yang baik mengandung tiga komponen yaitu mengetahui hal yang baik (*knowing the good*), ada keinginan terhadap hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*). Karakter yang baik akan membangun kesadaran dalam diri setiap warga negara baik dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajibannya.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara widodo (2011: 19) yaitu :

- 1) Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.
- 2) Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ikut serta dalam pemilihan umum.
- 4) Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara
- 5) Berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan negara

Citizenship Conscience (Kesadaran kewarganegaraan) merupakan sebuah karakter yang perlu untuk dibentuk dan dimiliki oleh setiap manusia, mengingat bahwa negara Indonesia memberikan hak dan kewajiban yang sama antar semua warga negaranya, tanpa adanya kesadaran untuk saling menjaga antara hak dan kewajiban yang dimiliki sesama warga negara dapat menimbulkan suatu perpecahan, dengan demikian membangun karakter tersebut sangatlah penting.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Indikator *Citizenship Conscience*

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	22 – 24	11	55%	Setuju
2	19 – 21	5	25%	Kurang Setuju
3	16 – 18	4	20%	Tidak Setuju
Jumlah		20	100%	

Sumber: Hasil Analisis Data Hasil Angket tahun 2019

Pada penelitian indikator *Citizenship Conscience*, diperoleh data sebanyak 4 responden (20%) menyatakan kategori tidak setuju. Hal ini dikarenakan beberapa mahasiswa belum mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sebagaimana yang ada dalam peraturan, dalam kegiatan kemasyarakatan, profesi, dan politik mahasiswa belum mampu berperan aktif. Kemudian, ketika terdapat penyelenggaraan pemilihan umum merasa enggan untuk menggunakan hak pilih, serta enggan dalam berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa, dalam beberapa keadaan belum mampu mematuhi perturan hukum yang berlaku, belum memiliki rasa cinta terhadap negara, belum mampu

memperlakukan semua warga negara dengan sama, serta belum memahami adanya kaitan bahwa dengan memiliki warga negara yang kondusif dapat mendorong kemajuan negara Indonesia.

Diperoleh data sebanyak 5 responden (25%) menyatakan kategori kurang setuju. Hal ini dikarenakan beberapa mahasiswa kurang mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sebagaimana yang ada dalam peraturan secara konsisten, dalam kegiatan kemasyarakatan, profesi, dan politik mahasiswa kurang mampu berperan aktif. Kemudian, ketika terdapat penyelenggaraan pemilihan umum merasa tidak antusias dalam menggunakan hak pilih, serta kurang berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa, dalam beberapa keadaan masih melanggar peraturan hukum yang berlaku, kurang memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negara, kurang mampu memperlakukan semua warga negara dengan sama, serta kurang memahami adanya kaitan bahwa dengan memiliki warga negara yang kondusif dapat mendorong kemajuan negara Indonesia.

Diperoleh data sebanyak 11 responden (55%) menyatakan kategori setuju. Hal ini dikarenakan beberapa mahasiswa telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sebagaimana yang ada dalam peraturan secara konsisten, dalam kegiatan kemasyarakatan, profesi, dan politik mahasiswa turut berperan aktif. Kemudian, ketika terdapat penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa sangat antusias dalam menggunakan hak pilih dan mengawal hasil pemilu, serta mampu berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa, taat pada peraturan hukum yang berlaku, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negara, mampu memperlakukan semua warga negara dengan sama, serta memahami adanya kaitan bahwa dengan memiliki warga negara yang kondusif dapat mendorong kemajuan negara Indonesia.

c. Peran dan Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk Citizenship Conscience mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu, kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diimplementasikan dengan baik melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang berlandaskan pada tujuan pendidikan serta pemantauan pembelajaran melalui evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran PKn dapat dicapai dengan baik serta mampu membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Sehingga, semakin berkualitas implementasi pembelajaran PKn maka akan semakin baik kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memegang peranan penerus bangsa Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implimentasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk *Citizenship Conscience*, dengan melihat hasil persentase pengukuran pada 3 indikator untuk mengukur implementasi pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa: menurut peserta pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diperoleh persentase tertinggi 45% dalam kategori setuju, hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan agar kedepannya dapat meningkat implementasinya. Menurut hasil penelitian maka pembelajaran PKn dapat membentuk *Citizenship Conscience* pada mahasiswa program studi PPKn , dan dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali agar pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik, dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

REFERENSI

- Agustrian, Nyimas Lisa. (2017). Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Volume 1. Nomor 1.
- Fibriana, Rosania Mega. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembelajaran Bela Negara Pada Mahasiswa Universitas Kahuripan Kediri. *Jurnal Koulutus: Jurnal Pendidikan Kahuripan*. Volume 1. Nomor 1.
- Isep. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Volume 13. Nomor 1.
- Kariadi, Dodik. (2017). Generasi Yang Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan Dan Nasionalisme Dalam Pembelajaran Pkn. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1. Nomor 2.
- Keer, David. (1999). *Citizenship Education: An Internasional Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kosasih, Djahiri. dkk. 1997. *Panduan Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lickona. (1992). *Educating From Character How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York-Toronto-London-Sidney-Auckland: Bantan Books.
- Nurizka, Rian., dan Abdul Rahim. (2019). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pengelolaan Kelas. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*. Volume 6, No.2 , November 2019, pp. 189-198.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 1 & 2 Tahun 1945. Tentang Bela Negara Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.
- Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J.H., Bachmueller, C.F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Suwarno W. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Civis*. Volume 1. Nomor 1.
- Sulkipani. (2017). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Untuk Mengembangkan Kesadaran Bela Negara Mahasiswa. *Jurnal Civics*. Volume 14. Nomor 1.
- Supriyanto, Anton. (2018). Upaya Untuk Meningkatkan Keberanian Berpendapat Dan Prestasi Belajar Melalui Penerapan Model Dilema Moral Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*. Volume 5, No.2 , November 2018, pp. 116-122.
- Widodo Bali. (2018). Membangun Kedewasaan Berpolitik Warga Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 3. No.1.
- Winataputra, Udin. & Dasim Budimansyah. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.